

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan dapat dilihat keberhasilannya apabila permasalahan dalam bidang ekonomi dapat teratasi, terutama permasalahan dalam ruang lingkup masyarakat. Karena pembangunan merupakan suatu langkah perubahan menjadi ke arah yang lebih baik. Todaro dan Smith (2003) mengungkapkan paradigma pembangunan dipandang hanya sebagai fenomena ekonomi seperti pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan berbagai hal terkait dengan ekonomi. Data empiris menunjukkan beberapa negara yang mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menghadapi masalah tingginya pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lain yang berhubungan dengan manusia. Akhirnya beberapa pihak menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadi jaminan terhadap perbaikan taraf hidup penduduk di suatu negara.

Tahun 1990 United Nations Development Programme (UNDP) mempublikasikan IPM yang diterbitkan dilaporan Human Development Report (HDR) secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dan bukan sebagai alat pembangunan. Mahbub ul Haq berpendapat bahwa pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperluas pilihan bagi manusia, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk

mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (BPS, 2012).

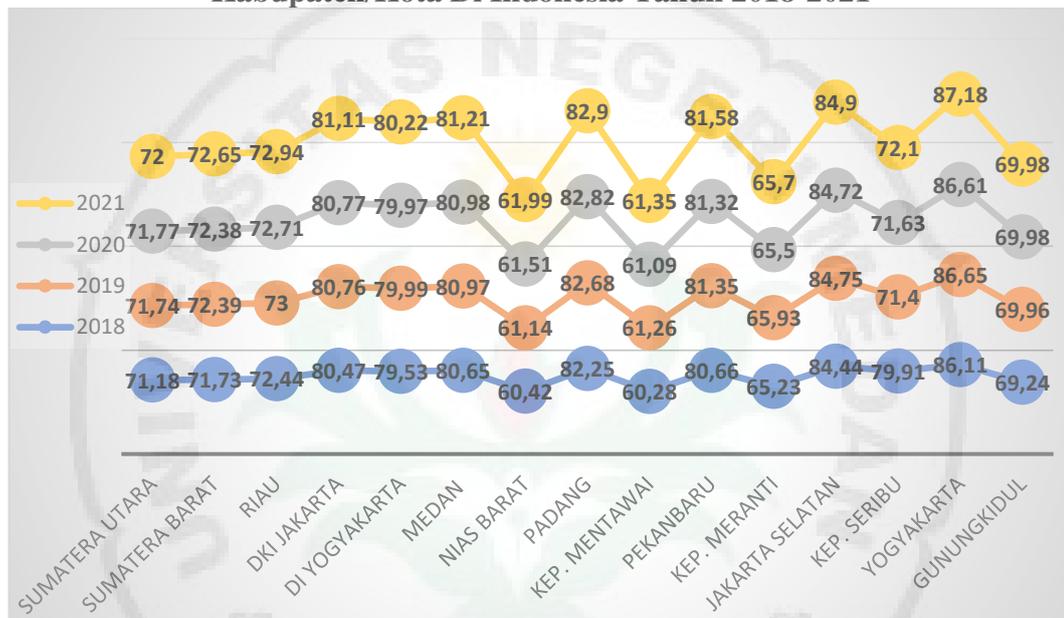
Menurut Maharany (2012), untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, manusia harus mampu mengembangkan dan meningkatkan kapasitasnya dalam berbagai situasi yang menantang sehingga proses pembangunan dapat berlangsung di semua aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Priyarsono, 2020).

Penting untuk memperhatikan pembangunan manusia karena ini melibatkan lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, produksi komoditas, dan akumulasi modal. Meskipun banyak negara berkembang termasuk Indonesia, telah mencapai pertumbuhan ekonomi, mereka masih menghadapi kesenjangan sosial ekonomi dan masalah kemiskinan yang belum teratasi.

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang meliputi 33 kabupaten dan kota. Salah satu permasalahan pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara, yaitu capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara yang cenderung meningkat beberapa tahun ini. Namun peningkatan tersebut ternyata tidak cukup kuat untuk mengangkat posisi relatif indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara ke level yang

diharapkan. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi lebih baik lagi dan dapat berada di atas angka nasional dalam hal pembangunan manusia.

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Di Beberapa Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2018-2021



Sumber: BPS Sumatera Utara

Berdasarkan Grafik 1.1, secara umum IPM tertinggi di Indonesia ialah Provinsi DKI Jakarta dengan Kab/Kota tertinggi yakni Jakarta Selatan dan menjadi salah satu kota dengan angka IPM tertinggi Di Indonesia, Hal ini disebabkan karena terpenuhinya fasilitas yang ada di daerah tersebut serta memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya seperti pendidikan, kesehatan, serta menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Selanjutnya diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan Kab/Kota tertinggi yakni Kota Yogyakarta dan menjadi kota dengan angka IPM tertinggi Di Indonesia, Hal ini disebabkan oleh fasilitas pendidikan yang sangat mudah dijangkau dan memiliki kualitas yang baik yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan IPM

di daerah tersebut. Sedangkan di Pulau Sumatera, IPM tertinggi berada di Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Padang dengan Kab/Kota tertinggi dan Provinsi Riau dengan Kota Pekanbaru dengan Kab/Kota tertinggi. Kedua Provinsi tersebut juga sudah berada diatas angka nasional IPM di Indonesia dalam kurun waktu 2018-2021. Sedangkan jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu tersebut belum dapat berada diatas angka nasional IPM di Indonesia. Kota Medan adalah daerah dengan angka IPM tertinggi di Sumatera Utara dan hanya satu-satunya yang dikategorikan dengan IPM sangat tinggi di Sumatera Utara. Dominasi Kota Medan dalam pembangunan manusia di Sumatera Utara nampaknya tidak lepas dari kemudahan akses dan fasilitas yang ada di dalamnya. Selain itu, sebagai pusat ekonomi Sumatera Utara, pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kota Medan tercatat sangat tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Sementara itu, capaian IPM terendah di Provinsi DKI Jakarta ialah Kep. Seribu, lalu di Provinsi DI Yogyakarta ialah Gunungkidul. Provinsi Sumatera Barat daerah dengan IPM terendah ialah Kep. Mentawai dan Provinsi Riau daerah IPM terendah ialah Kep. Meranti. Sedangkan Di Provinsi Sumatera Utara dicatat oleh Kabupaten Nias Barat. Kondisi di Nias Barat memang perlu mendapatkan perhatian lebih. Kemungkinan karena fasilitas sekolah yang kurang memadai ataupun karena faktor ekonomi. Hal ini juga memberi pengaruh pada dimensi pengeluaran perkapita, yang pada akhirnya mempengaruhi besaran IPM.

Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2021



Sumber: BPS Sumatera Utara

Berdasarkan Grafik 1.2 menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara sebesar 71,18, lalu meningkat menjadi 71,74 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi perlambatan peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara menjadi 71,77. Angka IPM Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 mencapai 72,00. Meskipun demikian, dengan capaian sebesar itu, Sumatera Utara menempati urutan ke-15 di Indonesia dan masih berada dibawah angka nasional yang mencapai 72,29 dalam hal pembangunan manusia tahun 2021.

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Berdasarkan BPS, adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan IPM hanya sebesar 0,04

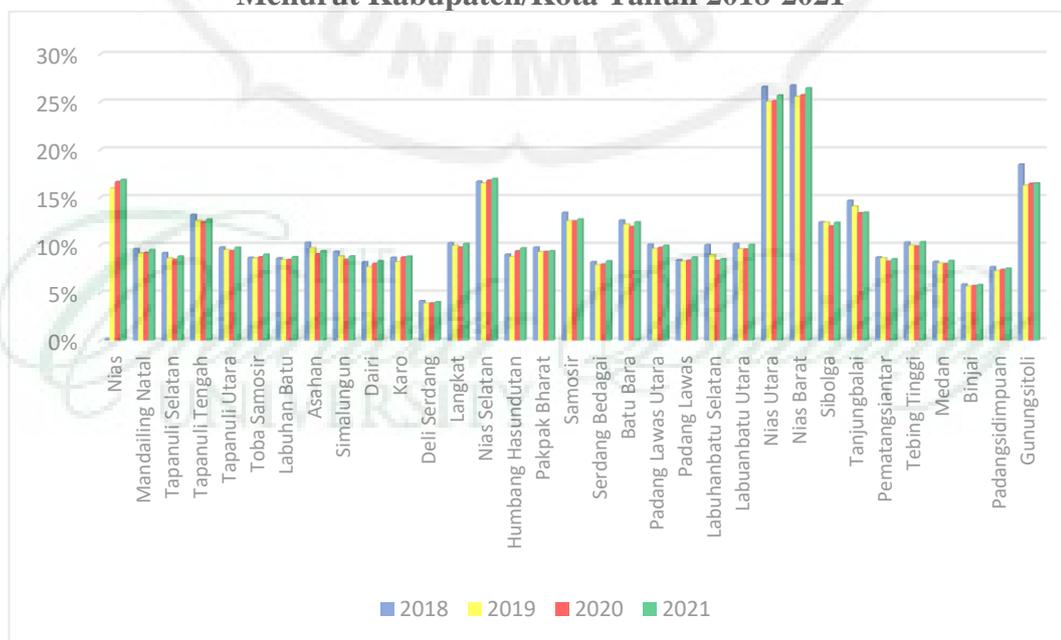
persen, menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 0,79 persen. Perlambatan pertumbuhan IPM dimasa pandemi Covid-19 ini disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita di Sumatera Utara sebesar 10,42 juta rupiah, menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 10,64 juta rupiah. Namun pada tahun 2021, kembali meningkat menjadi sebesar 10,50 juta rupiah meskipun belum mencapai seperti tahun 2019 namun diharapkan menunjukkan tanda-tanda perbaikan perekonomian di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut Tahun 2019-2023, IPM Sumut ditargetkan 72.75 di tahun 2023. Artinya dibutuhkan peningkatan sebesar 0.75 poin dari pencapaian IPM terakhir. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal seperti peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak penempatan dan peningkatan kompetensi tenaga medis, Keberpihakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan (*pro-poor policy*) sangat penting pada sektor publik dalam rangka penyediaan kapasitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Untuk memaksimalkan peran pemerintah pusat terhadap bidang perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut, pemerintah pusat dapat memberikan intervensi secara langsung maupun tidak langsung dalam penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen melalui

kebijakan penetapan harga minimum (*floor price*) dan kebijakan penetapan harga maksimum (*ceiling price*) (Kementerian Keuangan, 2021).

Menurut BPS (2019), kapabilitas seseorang dalam ekonomi seringkali terbentur dengan kemiskinan. Uang memiliki arti yang penting untuk memperluas pilihan. Faktor kemiskinan dapat menghambat berbagai aspek dalam kehidupan diantaranya aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, padahal kedua aspek tersebut merupakan aksesibilitas dasar dalam pembangunan manusia. Menanggulangi kemiskinan bukan perkara yang mudah karena terkait dengan berbagai dimensi kehidupan yang saling berpengaruh satu dengan lainnya. Dampak pandemi Covid-19 juga terlihat dari tren kemiskinan yang naik pada tahun 2020.

Gambar 1.3 Presentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2021



Sumber: BPS Sumatera Utara

Berdasarkan Grafik 1.3 menjelaskan Presentase Penduduk Miskin di berbagai Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021 cenderung mengalami kondisi yang fluktuatif (naik turun). Pada Maret 2021 presentase penduduk miskin di Sumatera Utara berada dibawah presentase penduduk miskin di Indonesia, akan tetapi presentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, dan menempati peringkat ke-17 dari 34 provinsi. Presentase penduduk miskin di Indonesia adalah 10,14 persen dan Sumatera Utara 9,01 persen (BPS Sumut 2021).

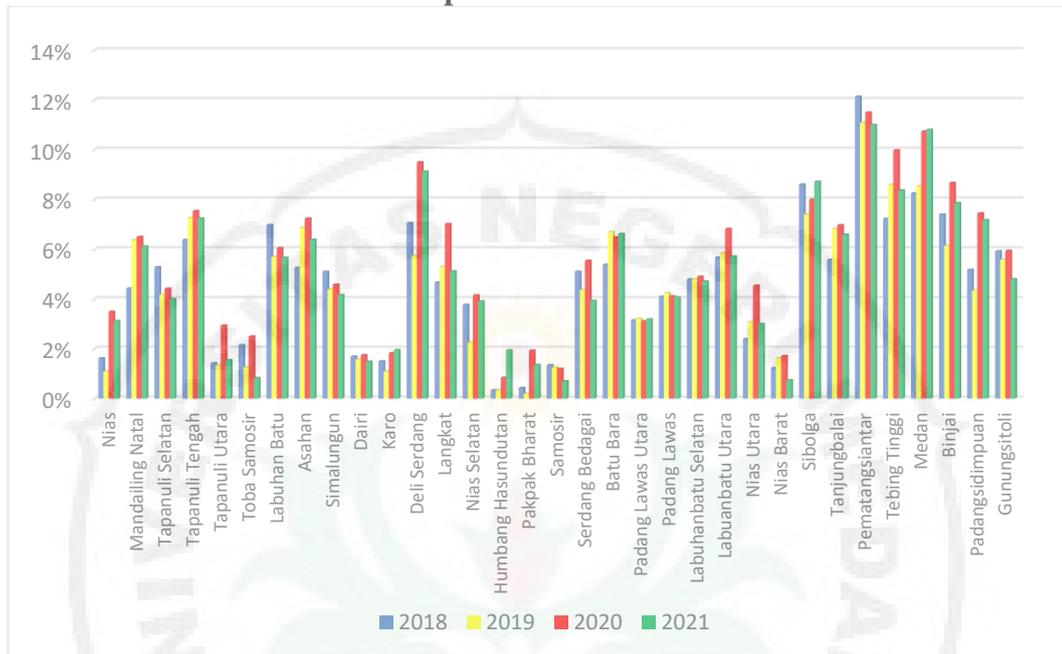
Pada tahun 2021 Kabupaten Nias Barat dan Nias Utara menjadi daerah presentase penduduk miskin yang tertinggi dengan 26,42% dan 25,66%, sangat jauh berbeda diantara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara lainnya. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pendapatan, daya beli masyarakat, serta kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menekan tingkat kemiskinan. Sedangkan pada tahun 2021 presentase penduduk miskin terendah berada di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai dengan tingkat kemiskinan sebesar 4,01% dan 5,81%.

Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang hampir miskin, terutama di perkotaan, karena kelompok ini rentan dan mudah terjerembab ke dalam kemiskinan. Menurut UNDP (1996) hubungan antara tingkat kemiskinan dan pembangunan manusia, yaitu banyaknya penduduk miskin turut mempengaruhi pembangunan manusia. Karena penduduk yang masuk kelompok ini, pada umumnya memiliki keterbatasan pada faktor produksi, sehingga akses terhadap kegiatan ekonomi mengalami hambatan.

Akibatnya produktivitas menjadi rendah, pada gilirannya pendapatan yang diterima pun jauh dari cukup. Dampaknya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan mengalami kesulitan. Apalagi untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya menjadi terhambat. Implikasinya pada wilayah-wilayah yang terdapat cukup banyak penduduk miskin, akan mengalami kesulitan untuk mencapai keberhasilan pada pembangunan manusianya.

Masalah kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah utama yang dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan menghambat peningkatan indeks pembangunan manusia. Kemiskinan dan pengangguran saling berkaitan satu dengan lainnya. Pengangguran mengurangi pendapatan yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turun kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya dapat meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Salah satu ukuran pengangguran adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan (BPS, 2021). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2021



Sumber: BPS Sumatera Utara

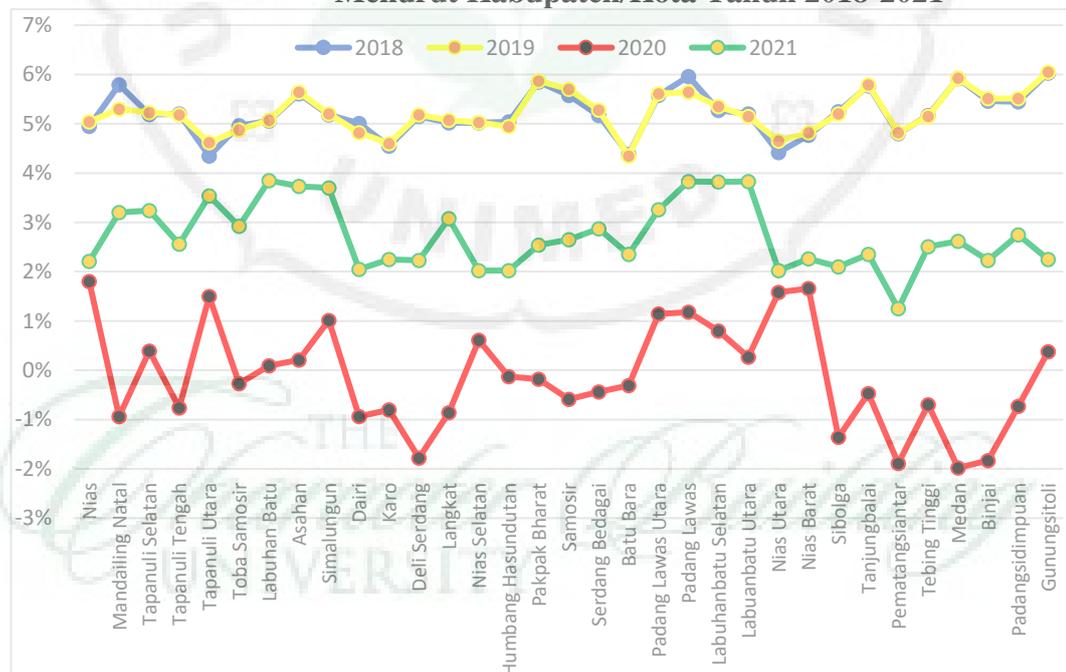
Berdasarkan Grafik 1.4 menjelaskan Tingkat Pengangguran Terbuka di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami kondisi fluktuatif (naik turun). Dalam kurun waktu 2018-2021 Kota Pematang Siantar dan Kota Medan menjadi daerah dengan pengangguran terbuka tertinggi di Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka di Kota Pematang Siantar dan Kota Medan masing-masing sebesar 11% dan 10,81%. Hal ini dikarenakan banyaknya mobilitas penduduk desa ke kota yang mengakibatkan jumlah penduduk kota bertambah dan tidak diikuti dengan semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga banyak masyarakat pada akhirnya menjadi pengangguran. Sedangkan daerah dengan pengangguran terbuka terendah di Provinsi Sumatera Utara ialah Kabupaten

Humbang Hasundutan dan Kabupaten Pakpak Bharat, namun pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan drastis dibandingkan dengan tahun 2019 yang semula masing-masing sebesar 0,33% dan 0,19% menjadi 0,84% dan 1,93%, hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka yang terjadi pada tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara secara menyeluruh dan sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakatnya. Banyak perusahaan-perusahaan yang harus gulung tikar sehingga terpaksa memutus hubungan kerja dengan karyawannya. Hal itulah yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 meningkat drastis. Dengan mengurangi tingkat pengangguran, diharapkan dapat meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara. Dengan memiliki lebih banyak masyarakat yang sehat, diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini akan menjadi modal untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara. Todaro (2000) mengemukakan bahwa pembangunan manusia adalah tujuan dari pembangunan itu sendiri. Dengan diatasinya pengangguran, berdampak kepada peningkatan pendapatan suatu penduduk sehingga akan mengakibatkan kepada peningkatan pembangunan manusia dengan berbagai peningkatan kualitas hidup yang berhasil dicapai seperti kebutuhan gizi, konsumsi rumah tangga dan pendidikan maka pengurangan pengangguran dapat mengalami perubahan indeks pembangunan manusia yang semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan manusia (human capital) dan mendorong penelitian untuk meningkatkan produktivitas manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan atau lembaga akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan atau lembaga juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. (Novian Eka, 2018).

Gambar 1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2021



Sumber: BPS Sumatera Utara

Berdasarkan Grafik 1.5 menjelaskan Laju Pertumbuhan Ekonomi berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021 mengalami kondisi

yang fluktuatif. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena penurunan permintaan akibat terbatasnya daya beli masyarakat oleh karena Pandemi Covid-19, masyarakat menahan konsumsi dan cenderung untuk berjaga-jaga ditengah ketidakpastian pada masa pandemi. Pada tahun 2021 perlahan laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlahan mengalami peningkatan kembali.

Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Padang Lawas menjadi daerah yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,85% dan 3,83%. Hal ini dikarenakan cukup besarnya pendapatan masyarakat dari beberapa sektor salah satunya sektor pertanian dan industri pengolahan kelapa sawit di daerah tersebut. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Sumatera Utara ialah Kota Pematang Siantar yakni sebesar 1,25%. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya daya beli masyarakat dan juga sedikitnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pematang Siantar karena masih adanya kasus Covid-19 dan sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Ranis (2004) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan dampak langsung pada peningkatan pembangunan manusia dari peningkatan pendapatan. Pendapatan yang meningkat akan mendorong pengeluaran rumah tangga untuk makanan yang bergizi serta pendidikan dan kesehatan khususnya pada rumah tangga yang miskin. Menurut data pada BPS Sumatera Utara, Pembangunan ekonomi yang berkepanjangan di Provinsi Sumatera Utara nyatanya telah memberikan pengembangan ekonomi dan sosial bagi masyarakat

yaitu apabila pertumbuhan ekonomi membaik maka tingkat pendapatan masyarakat juga akan naik sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat daerah di Sumatera Utara.

Penelitian yang mengkaji antara kemiskinan, pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi sudah pernah diteliti sebelumnya. M. Ayub (2018) mengungkapkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Namun hasil berbeda ditemukan oleh Candrawati, dkk (2020) mengungkapkan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan laju pertumbuhan ekonomi semuanya berdampak pada indeks pembangunan manusia. Tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berdampak negatif pada indeks pembangunan manusia. Variabel yang memiliki pengaruh besar terhadap indeks pembangunan manusia adalah tingkat pengangguran terbuka.

Menurut penjelasan diatas, masih belum maksimal nya peningkatan mutu IPM dikarenakan persoalan yang berkaitan dengan unsur-unsur dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, hal inilah yang menjadi menarik untuk diteliti dan penulis melakukan penelitian ilmiah yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara”. Ini merupakan suatu topik yang sangat menarik untuk dibahas dengan melihat seberapa jauh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk dari beberapa faktor

seperti tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Identifikasi Masalah

Dapat diidentifikasi permasalahan dari latar belakang masalah di atas, yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara terus meningkat namun lambat dan angka IPM Sumatera Utara masih berada dibawah angka nasional dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.
2. Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan di karenakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Sumatera Utara.
3. Tingkat pengangguran terbuka Sumatera Utara dalam beberapa tahun terakhir mengalami kondisi yang fluktuatif, kenaikan terbesar terjadi di tahun 2020 akibat dari pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi kondisi masyarakat.
4. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mengalami kondisi yang fluktuatif, penurunan terbesar terjadi pada tahun 2020 disebabkan karena penurunan permintaan akibat terbatasnya daya beli masyarakat oleh karena Pandemi Covid-19.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, maka dilakukan pembatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian ini menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi.
2. Data untuk variabel penelitian diambil dari kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Utara.
3. Data yang dipakai ialah data tahunan dalam kurun waktu 2018-2021

1.4 Rumusan Masalah

Melalui latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan, maka dirumuskan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah ada pengaruh Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah ada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah ada pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengangguran Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengangguran Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan, penelitian ini mampu dijadikan sebagai pertimbangan dan sumbangan wawasan bagi pemerintah daerah yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia dan kaitannya dengan perekonomian di Sumatera Utara.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Dapat memberikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, informasi, pemikiran dan kepada pihak lain yang berkepentingan khususnya di lingkup perguruan tinggi. Serta dijadikan acuan dan rujukan bagi penelitian berikutnya.

c. Bagi Peneliti

Dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada peneliti berkaitan dengan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.